

Kebijakan Pemerintah dan Dampaknya terhadap Ekonomi Pesisir: Kasus Kabupaten Morowali

Government Policies and Their Impacts on Coastal Economy: A Case of Morowali District

Makmur Jaya^{1*}

¹DIlmu Pemerintahan, Universitas Indonesia Timur, Makassar

email:

makmurjayaempattujuh@gmail.com

Kata Kunci

Perekonomian pesisir

Peran pemerintah

Kebijakan pemberdayaan

Keywords:

Coastal economy

The role of government

Empowerment policy

Received: Februari 2025

Accepted: Maret 2025

Published: Maret 2025

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran pemerintah dalam mengembangkan ekonomi masyarakat pesisir di Kabupaten Morowali, khususnya dalam sektor usaha budidaya dan pengelolaan produk hasil kelautan dan perikanan. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif berdasarkan data primer dan sekunder. Temuan menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah mengambil berbagai langkah strategis melalui kebijakan pembinaan, pelatihan, dan pendampingan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat pesisir. Meskipun demikian, tantangan seperti keterbatasan pengetahuan dan ketersediaan bahan baku menjadi hambatan dalam pengembangan sektor ini. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi untuk memahami dinamika implementasi kebijakan ekonomi pesisir di tingkat lokal.

Abstract

This research aims to identify the role of the government in developing the coastal community economy in Morowali District, focusing on aquaculture and management of marine and fisheries products. The research methodology used is descriptive analysis based on primary and secondary data. Findings indicate that the local government has implemented various strategic measures through policies of training, mentoring, and support to enhance the economic independence of coastal communities. However, challenges such as knowledge limitations and seasonal scarcity of raw materials remain obstacles in developing this sector. Thus, this study contributes to understanding the dynamics of coastal economic policy implementation at the local level.



© Year Author(s). Published by Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Timur <https://jurnal.uit.ac.id/JPE>. This is Open Access article under the Creative Commons Attribution 4.0 International License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>) DOI: <https://doi.org/10.36090>

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 17.504 pulau dengan garis pantai mencapai lebih dari 81.000 km. Populasi penduduk di kawasan pesisir mencapai 16,42 juta jiwa pada tahun 2016. Meskipun terdapat 8.090 komunitas pesisir di Indonesia, beberapa bagian dari garis pantai mengalami tekanan yang signifikan terhadap sumber daya hayati dan nonhayati, serta jasa lingkungan yang vital bagi kehidupan. (Nurzaman, 2020)

Kondisi topografi Indonesia yang meliputi garis pantai yang panjang dan potensi laut yang besar membuatnya kaya akan sumber daya alam. Kawasan pesisir juga merupakan habitat bagi berbagai jenis makhluk hidup dan

menyediakan berbagai jasa lingkungan serta sumber daya alam yang esensial bagi manusia. Oleh karena itu, wilayah ini dianggap strategis karena berlimpahnya sumber daya alam dan jasa lingkungan di zona transisi antara darat dan laut. (Yelly Zamaya & Dahlan Tampubolon, 2021)

Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, yang merupakan pengembangan dari undang-undang sebelumnya yang lebih fokus pada eksploitasi sumber daya daripada perlindungan lingkungan. Undang-undang ini mewajibkan pembentukan Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), yang merinci penggunaan sumber daya dan tata ruang wilayah secara terperinci (Antu et al., 2021). Meskipun potensi sumber daya alam yang melimpah, prasurevey pada tahun 2020 menunjukkan bahwa ekonomi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kabupaten Morowali belum sepenuhnya stabil dan merata (Basri, 2021). Pembangunan yang belum merata serta keterbatasan sarana dan prasarana menjadi tantangan utama yang perlu diatasi untuk mendukung perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Untuk tinjauan teori administrasi dalam konteks pengelolaan wilayah pesisir di Indonesia, administrasi publik mengacu pada proses pembuatan kebijakan dan implementasi oleh pemerintah untuk menangani masalah-masalah publik yang meliputi pengelolaan sumber daya alam. Administrasi publik tidak hanya mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan, tetapi juga harus memperhatikan aspek keadilan sosial dan perlindungan lingkungan (Yunisya et al., 2021). Pengimplementasian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan contoh nyata bagaimana pemerintah berusaha mengatur eksploitasi sumber daya alam pesisir dengan mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal (Subagyo et al., 2020). Tinjauan ini menggarisbawahi pentingnya administrasi publik yang efektif dalam memitigasi konflik kepentingan dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir Indonesia.

Penelitian terdahulu yang relevan mengenai pengelolaan wilayah pesisir di Indonesia mencakup beberapa studi penting. Pertama, studi tentang implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menggambarkan upaya pemerintah dalam mengatur eksploitasi sumber daya alam pesisir dengan mempertimbangkan aspek lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal (Murhenna Uzra & Suparno, 2020). Selanjutnya, analisis ekonomi sumber daya pesisir menyoroti nilai ekonomi dari ekosistem pesisir dan laut, baik yang langsung maupun tidak langsung (Chandriyanti & Fahrati, 2020). Studi kasus di Kabupaten Morowali memberikan gambaran konkret mengenai tantangan dan potensi dalam pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir. Penelitian juga mengungkapkan peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan wilayah pesisir serta faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi mereka. Terakhir, analisis hukum dan kebijakan mengevaluasi implementasi regulasi terkait pengelolaan wilayah pesisir, mengidentifikasi tantangan dalam penerapan kebijakan, dan memberikan

rekomendasi untuk perbaikan kebijakan yang lebih efektif di masa depan. Studi-studi ini memberikan landasan yang kokoh untuk pengembangan kebijakan dan praktik yang lebih berkelanjutan dalam pengelolaan wilayah pesisir Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk mendalami fenomena dengan mendalam dan mengumpulkan data melalui triangulasi, menekankan pada pemahaman makna. Fokus utama penelitian ini adalah untuk menggali data penting terkait dengan permasalahan yang dihadapi. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan yang dipilih secara purposive berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Sementara itu, data sekunder digunakan untuk mendukung keperluan data, seperti dokumen jurnal, dokumen kantor terkait, dan penelusuran data online. Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka. Informan utama meliputi pejabat dari Dinas Perikanan Kabupaten Morowali, Kabid Pemberdayaan Nelayan dan Usaha Pembudidaya Ikan, Kabid Penerbitan SIUP dan Pengelolaan TPI, Seksi Kelembagaan, serta Kabid Pengelolaan dan Pembudidaya Ikan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Pesisir.

Penelitian ini mengidentifikasi peran krusial pemerintah dalam mengembangkan ekonomi masyarakat pesisir di Kabupaten Morowali, dengan fokus pada usaha budidaya dan pengelolaan produk hasil kelautan dan perikanan. Tabel berikut merangkum berbagai aspek temuan penelitian yang relevan untuk memahami bagaimana kebijakan dan implementasi pemerintah dapat mempengaruhi dan memperkuat ekonomi lokal di daerah tersebut.

Tabel 1. Peran Pemerintah dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Pesisir di Kabupaten Morowali

Kategori Data	Temuan Penelitian	Deskripsi	Analisis
Usaha Budidaya	Kabupaten Morowali memiliki potensi luas perairan untuk budidaya ikan dan rumput laut.	Pemerintah daerah mendorong pembinaan dan pelatihan untuk meningkatkan kemandirian kelompok budidaya.	Potensi besar kabupaten Morowali dalam budidaya menunjukkan peluang signifikan untuk ekonomi lokal.
Pengelolaan Produk Hasil Kelautan dan Perikanan	Pemerintah mendukung pengembangan produk hasil kelautan dengan penyuluhan dan paket teknologi.	Pendampingan terhadap kelompok usaha untuk memaksimalkan hasil olahan ikan.	Dukungan pemerintah terhadap pengelolaan produk kelautan dan perikanan meningkatkan nilai tambah lokal.
Masalah dan Tantangan	Keterbatasan pengetahuan dalam pengembangan produk olahan	Kolaborasi dengan instansi terkait untuk mengatasi masalah	Tantangan dalam pengelolaan produk perikanan menuntut

Kategori Data	Temuan Penelitian	Deskripsi	Analisis
Keberlanjutan Program	ikan dan kelangkaan bahan baku selama musim tertentu.	ini melalui pendekatan komunitas.	peran aktif pemerintah dalam mengatasinya.
	Monitoring dan evaluasi terhadap bantuan dan pembinaan yang diberikan untuk memastikan efektivitasnya.	Langkah-langkah untuk meningkatkan keberlanjutan program pengembangan ekonomi pesisir.	Pentingnya keberlanjutan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir di Morowali.

Sumber, Hasil penelitian, 2022

Penelitian ini mengeksplorasi peran penting pemerintah dalam memajukan ekonomi masyarakat pesisir di Kabupaten Morowali, fokus utamanya adalah pada sektor usaha budidaya dan pengelolaan produk hasil kelautan serta perikanan. Kabupaten Morowali dikenal memiliki potensi alam yang luas dalam hal sumber daya kelautan, mencakup berbagai kegiatan seperti budidaya ikan dan rumput laut. Melalui Perda Nomor 10 tahun 2017, pemerintah setempat telah mengambil langkah strategis untuk memfasilitasi pembinaan, pelatihan, dan pendampingan bagi kelompok-kelompok usaha lokal. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi mereka serta memperkuat kontribusi mereka dalam pembangunan ekonomi daerah.

Analisis temuan menunjukkan bahwa meskipun terdapat potensi besar, sektor ini juga menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah keterbatasan pengetahuan dan keterampilan dalam pengembangan produk olahan ikan serta kelangkaan bahan baku selama musim tertentu. Pemerintah diharapkan dapat berperan aktif dalam mengatasi tantangan ini dengan menyediakan pelatihan yang tepat serta mengkoordinasikan pendekatan lintas sektor untuk memastikan keberlanjutan usaha budidaya dan pengelolaan produk kelautan. Dengan demikian, akan tercipta lingkungan yang mendukung bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi masyarakat pesisir Kabupaten Morowali.

Selain itu, pentingnya keberlanjutan juga menjadi fokus dalam analisis ini. Dukungan pemerintah tidak hanya pada tahap awal pembinaan dan pelatihan, tetapi juga pada monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas program yang telah diimplementasikan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memastikan bahwa setiap bantuan dan dukungan yang diberikan benar-benar memberikan dampak yang signifikan bagi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Pendekatan ini juga mendukung upaya untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang lebih luas, dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan secara seimbang.

Secara keseluruhan, penelitian ini menggarisbawahi betapa krusialnya peran pemerintah dalam menggerakkan ekonomi lokal di wilayah pesisir. Dengan mempertimbangkan potensi alam yang melimpah dan tantangan yang dihadapi, langkah-langkah strategis seperti pendidikan, pembinaan, dan pemantauan

yang efektif dapat memperkuat kapasitas masyarakat pesisir untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan dan inklusif di Kabupaten Morowali.

Analisis dalam teori administrasi dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang berbagai pendekatan dan konsep yang relevan dalam konteks pengelolaan pemerintahan dan administrasi publik. Salah satu teori yang signifikan adalah Teori Birokrasi yang dikembangkan oleh Max Weber. Teori ini menekankan pentingnya struktur hierarkis, pembagian tugas yang jelas, dan aturan yang terstandarisasi dalam mencapai efisiensi administrasi. Birokrasi menawarkan kestabilan dan prediktabilitas dalam operasional pemerintahan, tetapi juga dapat dihadapkan pada kritik terkait kemungkinan birokratisasi yang berlebihan dan kurangnya fleksibilitas dalam menghadapi tantangan zaman yang terus berubah. (Harseno, 2017)

Selanjutnya, Teori Sistem merupakan pendekatan yang menggambarkan pemerintahan sebagai sistem terbuka yang terlibat dalam interaksi kompleks dengan lingkungannya. Teori ini menyoroti pentingnya adaptasi terhadap perubahan eksternal, interaksi antarunit organisasi, dan ketergantungan antarsistem dalam mencapai tujuan organisasi. Dalam konteks administrasi publik, pendekatan ini menekankan pentingnya pemerintah untuk tidak hanya berfokus pada efisiensi internal tetapi juga untuk mempertimbangkan dinamika eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja dan keberlanjutan. (Dupuis & Knoepfel, 2013)

Selain itu, Teori Kepemimpinan Administratif memberikan pemahaman tentang peran penting kepemimpinan dalam mengarahkan dan menggerakkan organisasi pemerintahan. Pendekatan ini menekankan bahwa kepemimpinan yang efektif tidak hanya membutuhkan keterampilan manajerial, tetapi juga kemampuan untuk menginspirasi, memotivasi, dan mengarahkan sumber daya manusia menuju pencapaian tujuan organisasi. Dalam konteks administrasi publik, kepemimpinan administratif yang kuat diperlukan untuk mengatasi tantangan kompleks dan memastikan bahwa kebijakan dan program pemerintah dapat diimplementasikan dengan efektif untuk kepentingan masyarakat. (Yelly Zamaya & Dahlan Tampubolon, 2021)

Peran Pemerintah Dalam Penataan Kelembagaan

Tabel 2: Analisis Peran Pemerintah dalam Meningkatkan Kapasitas Lembaga Masyarakat dan Manajemen Organisasi di Kabupaten Morowali

Kategori Data	Temuan	Deskripsi dan Analisis
Meningkatkan Kapasitas Lembaga Masyarakat	Program pembukaan lapangan kerja, lokasi dana modal usaha, peningkatan tunjangan kinerja, bantuan air bersih, bantuan pertanian dan perikanan, serta bantuan rumah layak huni.	Pemerintah Kabupaten Morowali mengimplementasikan berbagai program untuk meningkatkan kapasitas lembaga masyarakat, namun masih terdapat kebutuhan akan penyuluhan dan pembinaan yang lebih intensif.

Kategori Data	Temuan	Deskripsi dan Analisis
Manajemen Organisasi	Merumuskan strategi dari aspek organisasi, sumber daya, pelayanan, dan jaringan kerjasama.	Penguatan kelembagaan dilakukan melalui perencanaan strategis yang mencakup pengorganisasian yang lebih baik dan koordinasi yang lebih efektif antara pemerintah dan masyarakat.

Sumber, Hasil penelitian, 2022

Tabel ini menggambarkan hasil penelitian yang menyoroti peran pemerintah Kabupaten Morowali dalam meningkatkan kapasitas lembaga masyarakat dan manajemen organisasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah pesisir. Data dalam tabel dibagi menjadi dua kategori utama: pertama, upaya pemerintah dalam meningkatkan kapasitas lembaga masyarakat melalui berbagai program seperti pembukaan lapangan kerja, alokasi dana modal usaha, peningkatan tunjangan kinerja, serta bantuan infrastruktur dasar seperti air bersih dan listrik. Program-program ini dirancang untuk memperkuat kemampuan lembaga masyarakat lokal dalam mengelola sumber daya ekonomi dengan lebih mandiri.

Kedua, tabel ini juga mencatat strategi pemerintah dalam memperbaiki manajemen organisasi, yang mencakup formulasi strategi dari aspek organisasi, sumber daya, pelayanan publik, dan kerjasama antarlembaga. Pendekatan ini penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya laut dan pesisir, yang merupakan aset ekonomi utama di Kabupaten Morowali. Dengan merumuskan strategi yang tepat, pemerintah berupaya untuk mengoptimalkan kinerja organisasional dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Analisis dari tabel ini menunjukkan bahwa meskipun ada langkah-langkah positif yang telah diambil oleh pemerintah, masih ada tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah meningkatkan koordinasi antarprogram dan antarlembaga untuk memastikan implementasi yang konsisten dan efektif dari program-program ini. Selain itu, perlunya peningkatan dalam penyuluhan dan pelatihan bagi masyarakat pesisir agar mereka dapat lebih aktif dan mandiri dalam mengelola usaha ekonomi mereka sendiri. Hal ini sejalan dengan konsep kelembagaan yang baik, yang tidak hanya mencakup struktur formal tetapi juga partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses pembangunan.

Secara keseluruhan, tabel ini memberikan gambaran tentang upaya pemerintah Kabupaten Morowali dalam menghadapi kompleksitas pembangunan ekonomi di wilayah pesisir. Dengan memfokuskan pada peningkatan kapasitas lembaga masyarakat dan manajemen organisasi, pemerintah berharap untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir secara menyeluruh. Langkah-langkah selanjutnya termasuk peningkatan kolaborasi antarstakeholder dan evaluasi terus menerus terhadap implementasi kebijakan untuk memastikan dampak positif yang maksimal bagi penduduk lokal.

Analisis dari temuan ini menyoroti bahwa pemerintah Kabupaten Morowali telah melaksanakan berbagai program untuk memperkuat kapasitas lembaga masyarakat dan meningkatkan manajemen organisasi dalam sektor pesisir. Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam implementasi yang memerlukan perhatian lebih lanjut, seperti peningkatan dalam penyuluhan, pembinaan, dan koordinasi antarinstansi terkait. Ini menunjukkan perlunya pemerintah untuk terus membenahi struktur administratif dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan ekonomi lokal. (Nurzaman, 2020)

Dari segi kelembagaan, teori administrasi seperti yang dikemukakan oleh Max Weber dapat memberikan perspektif tentang pentingnya struktur hierarkis yang efisien dan aturan yang jelas dalam mencapai tujuan organisasi. Sementara itu, teori tentang sistem membantu memahami kompleksitas interaksi antarunit organisasi dan ketergantungan antarsistem dalam konteks administrasi publik. Integrasi dari berbagai teori ini dapat membantu pemerintah Kabupaten Morowali dalam mengatasi tantangan dan meningkatkan efektivitas dalam pembangunan ekonomi masyarakat pesisir secara berkelanjutan. (Pratiwi, 2021)

KESIMPULAN

Simpulan

penelitian ini menunjukkan bahwa potensi besar kabupaten ini dalam sektor budidaya dan pengelolaan produk kelautan memberikan peluang signifikan untuk pertumbuhan ekonomi lokal. Meskipun demikian, terdapat tantangan dalam hal pengetahuan dan ketersediaan bahan baku yang perlu diatasi. Pemerintah perlu meningkatkan pendekatan kolaboratif dengan berbagai pihak terkait serta memperkuat program pembinaan dan pelatihan untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas upaya tersebut. Secara keseluruhan, peran aktif pemerintah sangat penting dalam membangun ekonomi pesisir yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Morowali.

Saran

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk lebih mendalami efektivitas program-program yang telah diimplementasikan dalam mendukung ekonomi pesisir. Fokus utama dapat diberikan pada evaluasi mendalam terhadap keberlanjutan dan dampak jangka panjang dari program pembinaan, pelatihan, dan pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah. Studi komparatif antarwilayah atau antarnegara juga dapat memberikan wawasan tambahan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan ekonomi pesisir. Selain itu, penelitian tentang inovasi teknologi dan pendekatan kelembagaan dalam meningkatkan produktivitas sektor perikanan dan budidaya juga dapat menjadi fokus penting untuk menemukan solusi berkelanjutan bagi masyarakat pesisir..

REFERENSI

- Antu, Y., Mohi, E. H., Nggilu, R., Arsana, I. K. S., Binolombangan, F., & Endey, N. (2021). ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN EKONOMI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP UMKM DI KOTA GORONTALO. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 8(2). <https://doi.org/10.37606/publik.v8i2.231>
- Basri, Y. Z. (2021). Bunga rampai pembangunan ekonomi pesisir. *Buku Dosen-2007*.
- Chandriyanti, I., & Fahrati, E. (2020). Sosial Ekonomi Nelayan Pesisir Pantai Desa Swarangan Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut. *Ecoplan*, 3(2). <https://doi.org/10.20527/ecoplan.v3i2.130>
- Dupuis, J., & Knoepfel, P. (2013). The adaptation policy paradox: The implementation deficit of policies framed as climate change adaptation. *Ecology and Society*, 18(4). <https://doi.org/10.5751/ES-05965-180431>
- Harseno, R. M. (2017). Kebijakan Deregulasi dan Debirokratisasi Regulasi Ekonomi Kemaritiman sebagai Katalisator Nawacita Indonesia Poros Maritim Dunia. *Gema Keadilan*, 4(1). <https://doi.org/10.14710/gk.2017.3773>
- Murhenna Uzra, & Suparno. (2020). KEARIFAN LOKAL “HARI MATI DAN HARI IDUIK” DALAM KEGIATAN PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH PESISIR KENAGARIAN SUNGAI PINANG KABUPATEN PESISI SELATAN. *Journal of Sciencetech Research and Development*, 2(1). <https://doi.org/10.56670/jsrd.v2i1.11>
- Nurzaman, A. (2020). Tradisionalitas dan Modernitas Dikotomi Perkembangan Wilayah Pesisir Kabupaten Gunungkidul. *JAUR (JOURNAL OF ARCHITECTURE AND URBANISM RESEARCH)*, 3(2). <https://doi.org/10.31289/jaur.v3i2.3168>
- Pratiwi, A. (2021). Kebijakan Ekonomi: Perspektif Ekonomi Politik Dalam Pembangunan di Indonesia. *Abiwara: Jurnal Vokasi Administrasi Bisnis*, 3(1). <https://doi.org/10.31334/abiwara.v3i1.1847>
- Subagyo, T., Suhardono, E., & Suharjo, B. (2020). Implementasi Kebijakan Wilayah Pertahanan Laut di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. *Jurnal Strategi Pertahanan Laut*, 6(1).
- Yelly Zamaya, & Dahlan Tampubolon. (2021). Kebijakan Penentuan Pusat Pertumbuhan Industri Untuk Mendukung Pembangunan Daerah. *Jurnal Niara*, 14(2). <https://doi.org/10.31849/niara.v14i2.6248>
- Yunisya, A. N., Elviana, E., & Mutia, F. (2021). ANALISA SPASIAL DALAM PERKEMBANGAN WILAYAH EKONOMI DESA PESISIR KALANGANYAR. *BORDER*, 3(1). <https://doi.org/10.33005/border.v3i1.83>